

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Anggun Sinaga¹, Lufianna Uli Br Manullang²
anggunsinaga06@gmail.com¹, ulibrmanullanglufianna@gmail.com²
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Di Indonesia, terwujudnya negara demokrasi di bawah supremasi hukum sangat bergantung pada pembelaan dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun demikian, terdapat banyak sekali contoh pelanggaran hak asasi manusia, baik yang kecil maupun yang besar masih terjadi, menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak asasi manusia belum ideal. (Basir, 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga dan membela hak asasi manusia serta tantangan yang dihadapi dalam melakukannya. Dengan menggunakan data sekunder dari undang-undang dan peraturan terkait, literatur, dan publikasi ilmiah, pendekatan yuridis normatif digunakan. Kondisi empiris dijelaskan menggunakan analisis kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sejumlah instrumen hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Hambatan yang mencegah perlindungan hak asasi manusia yang efektif, termasuk kesadaran publik yang rendah, penegakan hukum yang lemah, dan masalah sosial budaya.

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Metode Pembelajaran, Karakteristik Pembelajar.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dan kehidupan manusia sangat terkait (HAM). Setiap orang berhak dijunjung tinggi, dipertahankan, dan dipenuhi oleh negara. Pasal 28A hingga 28J Konstitusi Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan yang melindungi hak asasi manusia. (Wirawan et al., 2011)

Indonesia memiliki potensi konflik yang signifikan karena keberagaman penduduknya terdiri dari berbagai ras, etnis, agama, dan tradisi. Meskipun keberagaman ini merupakan aset nasional, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Perselisihan sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seringkali berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia belum sepenuhnya berhasil.

Selain itu, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sehingga rentan menjadi korban pelanggaran. Faktor lain seperti lemahnya aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap pelanggaran turut memperburuk kondisi tersebut.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan menegakkan HAM serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah hukum, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia. (Harahap, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan dan Penegakan HAM

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah..(Najwan, 2022)

1. Dasar Hukum Perlindungan HAM

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia diatur oleh:

- Konstitusi tahun 1945
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
- Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000

Setiap warga negara berhak atas hak yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari negara berdasarkan hukum ini.

2. Pembentukan Lembaga HAM

Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga untuk mendukung penegakan HAM, seperti:

- Komnas HAM
- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, serta memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM.

3. Upaya Preventif

Untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, dilakukan tindakan pencegahan, seperti:

- Sosialisasi tentang HAM kepada masyarakat
- Pendidikan HAM di sekolah
- Kampanye anti kekerasan dan diskriminasi

Upaya ini penting karena rendahnya pemahaman masyarakat dapat menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM.

4. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, antara lain:

- Penegakan hukum terhadap pelaku
- Pemberian sanksi pidana
- Pemulihan hak korban

Namun, pada kenyataannya, penegak hukum sering menghadapi sejumlah tantangan, termasuk bukti yang lemah dan campur tangan dari luar..(Harahap, 2018)

B. Hambatan dalam Penegakan dan Perlindungan HAM

Meskipun telah banyak upaya dilakukan, masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sehingga tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan fenomena konflik sosial yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan dan nilai dalam masyarakat.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Budaya masyarakat yang menganggap pelanggaran sebagai hal biasa atau tabu untuk dilaporkan menjadi hambatan serius dalam penegakan HAM.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum terkadang tidak tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan secara tuntas.(Basir, 2011)

4. Kurangnya Fasilitas dan Dana

Keterbatasan fasilitas dan anggaran juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan kepada korban.

5. Konflik Sosial dan Politik

Konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan agama yang saling berkaitan.

Konflik tersebut dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam perlindungan dan penegakan HAM melalui peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga terkait. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif.
2. Hambatan dalam penegakan HAM meliputi faktor masyarakat, budaya, aparat penegak hukum, dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi HAM kepada masyarakat secara menyeluruh.
2. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa diskriminasi.
3. Perlu peningkatan fasilitas dan anggaran untuk perlindungan korban.
4. Masyarakat harus lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran HAM.
5. Diperlukan kerja sama antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, M. (2011). Hubungan Antar Suku Bangsa di Daerah Rawan Konflik (Kasus Desa Dandang Dan Desa Kampung Baru Kab. Luwu Utara). *Jurnal Al - Qalam*, 17 Nomor 2, 191–198.
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Najwan, J. (2022). Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya Johni. *Jurnal Pendidikan*, 1, 195–209.
- Wirawan, S., Di, T., Dalam, I., & Psilogi, T. (2011). Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012, *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psilogi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, hlm. 1 1. 1–32.